



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN I
DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2024**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja Triwulan I TA. 2024 Satker Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap dapat diselesaikan. Sebagai salah satu unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sejak Tahun 2013 telah memanfaatkan *Balanced Score Card* sebagai suatu alat dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan, sehingga seluruh unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. *Balanced Score Card* menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja. Mengacu pada RPJMN 2021 – 2024 dan RKP tahun 2023, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan senantiasa mengoptimalkan pelaksanaan seluruh rencana aksi dengan efektif dan efisien, sesuai target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKP dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode satu tahun.

Semoga apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 24 April 2024
Direktur Kepelabuhanan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tri Aris Wibowo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. **Rp. 86.705.270.000,-** . Realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan I tahun 2024 ini adalah sebesar Rp. 10.483.805.304,- atau telah mencapai 12,09% (sumber: <https://sakti.kemenkeu.go.id/>). Capaian kinerja Direktorat Pelabuhan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2024 masuk dalam kategori Baik, yang ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar 106,14% dan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK sebesar 106,14%.

Terkait dengan Indikator Kinerja, saat ini Direktorat Kepelabuhanan Perikanan memiliki 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja di tahun 2024, dimana pada triwulan I dilakukan perhitungan 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Waktu Pengukuran	Target
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal		
	1. Persentase Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan dan ditingkatkan Fasilitasnya (Persen)	Triwulan	6
	2. Persentase Pembangunan SKPT (Persen)	Tahunan	85
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing		
	3. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	Tahunan	35
	4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	Tahunan	2
	5. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	Tahunan	28
	6. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	Tahunan	48
	7. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	Tahunan	15

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Waktu Pengukuran	Target
	8. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	Tahunan	40
	9. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	Tahunan	78
	10. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	Tahunan	77
	11. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	Tahunan	78
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal		
	12. Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan)	Tahunan	296
	13. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	Tahunan	90
	14. Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala)	Tahunan	89
	15. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	Tahunan	100
	16. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	Tahunan	100
4	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan		
	17. Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan KP (Orang)	Tahunan	422
5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan		

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Waktu Pengukuran	Target
	18. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	Tahunan	94
	19. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	Semesteran	84
	20. Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	Triwulan	94
	21. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	Triwulan	80
	22. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	Semester	98

(Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2024)

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU dan Tim Pengelola Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan agar melakukan evaluasi pencapaian yang telah dicapai serta melakukan pemantauan serta pengawalan untuk pencapaian kinerja triwulanan yang akan datang. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan diharapkan dapat mendukung kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 TUGAS DAN FUNGSI	2
1.4 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
1.5 PERMASALAHAN UTAMA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN	4
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	5
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	7
2.2 PERJANJIAN KINERJA	9
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	14
3.2.1 <i>Sasaran Kegiatan (SK-1): Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang Optimal</i>	15
3.2.2 <i>Sasaran Kegiatan (SK-2): Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Berdaya Saing</i>	17
3.2.3 <i>Sasaran Kegiatan (SK-3): Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal</i>	33
3.2.4 <i>Sasaran Kegiatan (SK-4): Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan</i>	52
3.2.5 <i>Sasaran Kegiatan (SK-5): Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan</i>	53
BAB 4 PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2023	7
2	Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan triwulan I tahun 2024	12
3	Capaian IKU "Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya" sampai dengan triwulan I tahun 2024	16
4	Perbandingan Capaian IKU "Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya" sampai dengan triwulan I tahun 2024	16
5	Identifikasi kriteria teknis dan operasional pelabuhan perikanan	20
6	Pelabuhan Perikanan yang melakukan input data pada aplikasi PIPP	24
7	Daftar Pelabuhan Perikanan yang melakukan input data pada aplikasi PIPP	28
8	Daftar Pelabuhan Pangkalan yang telah ditetapkan	33
9	Capaian IKU "Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar" sampai dengan triwulan I tahun 2024	58
10	Perbandingan Capaian IKU "Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar" sampai dengan triwulan I tahun 2024	58
11	Capaian IKU "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan" sampai dengan triwulan I tahun 2024	58
12	Perbandingan Capaian IKU "Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan" sampai dengan triwulan I tahun 2024	59
13	Alokasi dan Realisasi Anggaran triwulan III tahun 2023	59

DAFTAR GAMBAR

1	Stuktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024	5
2	Perjanjian Kinerja Direktur Kelabuhanan Perikanan Tahun 2024	10
3	Dashboard Aplikasi Kinerjaku Dit. Kelabuhanan Perikanan Tahun 2024	11
4	IP ASN Tahun 2024 Direktorat Kelabuhanan Perikanan Triwulan I Tahun 2024	15

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan *outcome* berupa pengelolaan perikanan yang efisiensi dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah yang diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah pengembangan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur pelabuhan perikanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Ketersediaan pelabuhan perikanan di sentra usaha perikanan tangkap sangat penting dalam mendukung kelancaran usaha penangkapan ikan dan usaha pendukungnya. Pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel serta penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi tolok ukur penilaian kinerja suatu Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung terciptanya tujuan dimaksud, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Kinerja. Dasar dari penyusunan laporan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 68/Permen-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan I Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan I Tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan selama Triwulan I Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan

dalam suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan pelabuhan perikanan ke depan.

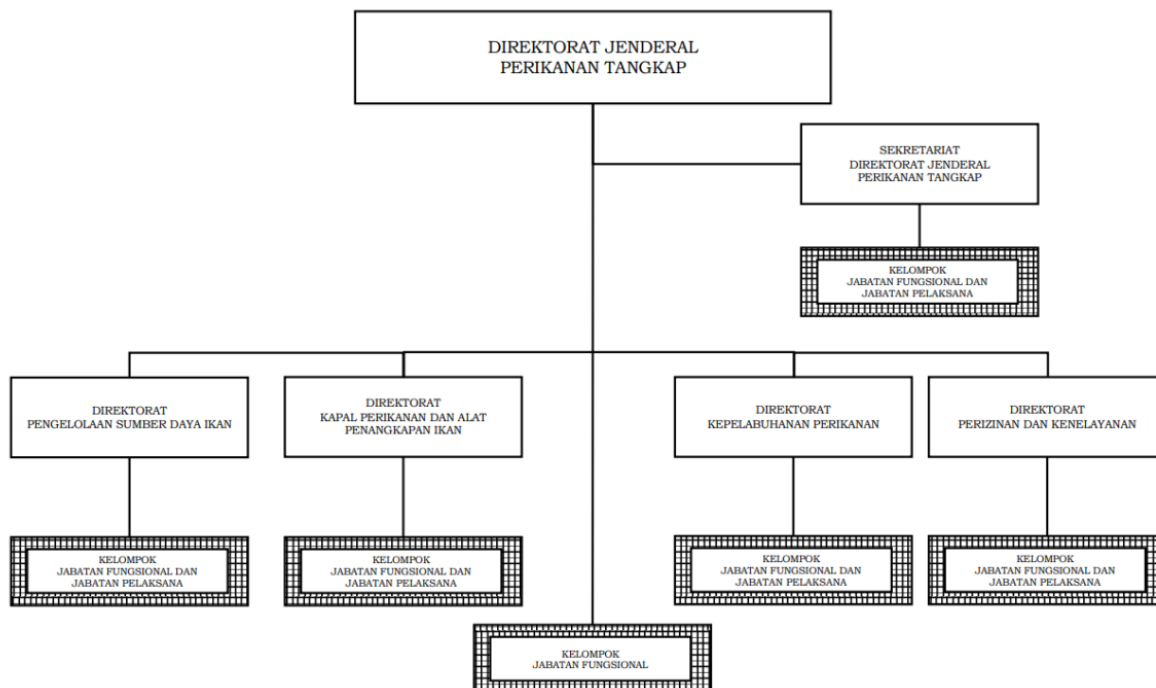
1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan BAB V Bagian Keenam Pasal 67, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Tugas Direktorat Kepelabuhanan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Sedangkan sesuai pasal 68, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mempunyai fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
5. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Stuktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tahun 2024 (sesuai dengan Permen KP Nomor 5 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan).

1.4 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah **“Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal”** dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya.
 - b. Persentase Pembangunan SKPT
2. Sasaran kegiatan kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah **“Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing”**, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen);
 - b. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen);
 - c. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen);

- d. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen);
 - e. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen);
 - f. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen);
 - g. Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen);
 - h. Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen);
 - i. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen).
3. Sasaran kegiatan ketiga (SK-3) yang akan dicapai adalah **"Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal"**, dengan indikator kinerja:
- a. Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan);
 - b. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan);
 - c. Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala);
 - d. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen);
 - e. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen);
4. Sasaran kegiatan keempat (SK-4) yang akan dicapai adalah **"Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan"**, dengan indikator kinerja: Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP.
5. Sasaran kegiatan keempat (SK-5) yang akan dicapai adalah **"Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan"**, dengan indikator kinerja:
- a. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)
 - b. IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)
 - c. Persentase unit Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar;
 - d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan dan;
 - e. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

1.5 PERMASALAHAN UTAMA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN

Pelabuhan perikanan dalam pengelolaannya tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, tetapi aspek lingkungan juga penting di perhatikan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan. Perpaduan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial merupakan suatu model pendekatan pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan yang riil demi

keberlanjutan pembangunannya dengan mengkombinasikan penerapan manajemen pelabuhan yang pro lingkungan.

Pengelolaan pelabuhan, dihadapkan pada tantangan dan membutuhkan pengaturan yang teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang sistematis. Kurangnya pengaturan di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, dewasa ini terasa sangat mengganggu dalam pengembangan potensi maritim yang dimiliki Indonesia.

Persoalan lain yang terkait dengan pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu adanya kecenderungan Pemerintah Daerah untuk mengelola Pelabuhan Perikanan, tanpa memperhatikan kemampuan dan ketersediaan fasilitas. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh keinginan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya.

Beberapa permasalahan pokok Pengelolaan Pelabuhan Perikanan telah teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya operasionalisasi Rencana induk pelabuhan perikanan nasional (RIPPN) pengaturan ruang pelabuhan perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan perikanan, rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan perikanan);
- b. kurangnya Syahbandar dan Petugas Syahbandar yang ditempatkan di Pelabuhan Perikanan;
- c. kurangnya jumlah pelabuhan perikanan yang tergabung Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), terutama Pelabuhan Perikanan yang ada syahbandarnya;
- d. terdapat operator PIPP yang dialih tugaskan ke Unit Kerja yang lain;
- e. rendahnya kepatuhan dalam menyampaikan hasil tangkapan ikan yang akurat, obyektif dan tepat waktu dalam aplikasi PIPP;
- f. Belum optimalnya sinergi pengelolaan Pelabuhan Perikanan antara pusat dan daerah, antar daerah, serta dengan sektor terkait.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2023 disusun sebagai berikut:

A. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

B. Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan

informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

C. Bab 2 Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

D. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

E. Bab 4 Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap disusun berdasarkan Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional terkait dengan sektor kelautan dan perikanan dengan rencana strategis sebagai berikut:

1. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi DJPT tahun 2020-2024 adalah “terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri, dan Berkepribadiann Berlandaskan Gotong-Royong”;

2. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

DJPT melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi subsektor perikanan tangkap;
- c. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap; dan
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

Sasaran Strategis Pembangunan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2024


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		WAKTU PENGUKURAN	TARGET
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	Triwulan	6
		2	Persentase Pembangunan SKPT	Tahunan	85
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	3	Persentase lokasi Pelabuhan perikanan yang telah dianalisis terkait kebutuhan Pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan(persen)	Tahunan	35
		4	Rencana Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (dokumen)	Tahunan	2
		5	Persentase Pelabuhan perikanan dengan Tingkat operasional optimum (persen)	Tahunan	28
		6	Tingkat pelayanan di Pelabuhan Perikanan (persen)	Tahunan	48

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	WAKTU PENGUKURAN	TARGET	
	7	Persentase Pelabuhan perikanan dengan Tingkat kinerja baik (persen)	Tahunan	15	
	8	Persentase pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (persen)	Tahunan	40	
	9	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (persen)	Tahunan	78	
	10	Tingkat pelayanan kapal perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	Triwulan	77	
	11	Tingkat kinerja penerapan pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (persen)	Tahunan	78	
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBPerikanan tangkap yang optimal	12	Pelabuhan perikanan yang menerapkan penangkapan ikan terukur (pelabuhan)	Tahunan	296
		13	Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBPerikanan Pasca Produksi (Pelabuhan)	Tahunan	90
		14	Tingkat penerapan PNBPerikanan Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (nilai/skala)	Tahunan	89
		15	Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan fish market bertaraf internasional yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri (persen)	Tahunan	100
		16	Persentase pelaksanaan Pembangunan/pengembangan Pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep Eco Fishing Port yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri (persen)	Tahunan	100
4	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kepelabuhanan perikanan	17	Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)	Tahunan	422
	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	18	Nilai rekonsiliasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (nilai)	Tahunan	94
		19	IP ASN Direktorat Kepelabuhanan perikanan (indeks)	Semester	84
		20	Persentase unit kerja Direktorat Kepelabuhanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	Triwulan	94
		21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	Triwulan	80
		22	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	Triwulan	98

(Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2024)

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Direktorat Kelautan dan Perikanan menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 5 (lima) sasaran kegiatan dan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL dpj@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tri Aris Wibowo**
 Jabatan : **Direktur Kelautan dan Perikanan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
 Jabatan : **Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,
Pihak Pertama
Direktur Kelautan dan Perikanan,


Tb. Haeru Rahayu


Tri Aris Wibowo



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1 Persentase Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan dan ditingkatkan Fasilitasnya (Persen)	6
		2 Persentase Pembangunan SKPT (Persen)	85
2	Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saling	3 Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	35
		4 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	2
		5 Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	28
		6 Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	48
		7 Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	15
		8 Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	40
		9 Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	78
		10 Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA) (Persen)	77
		11 Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	78
		12 Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan)	296
		13 Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	90
3	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal	14 Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala)	89
		15 Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16 Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	100
4	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan	17 Tenaga Kerja Yang Terlibat Pada Pengelolaan KP (Orang)	422
5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	18 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Nilai)	94
		19 IP ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	84
		20 Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	94
		21 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Manfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	80
		22 Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (Persen)	98

Kegiatan : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
 Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 118.869.120.000,-

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua : Pihak Pertama
 Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap : Direktur Kepelabuhanan Perikanan

 **Tb. Haeru Rahayu**  **Tri Aris Wibowo**

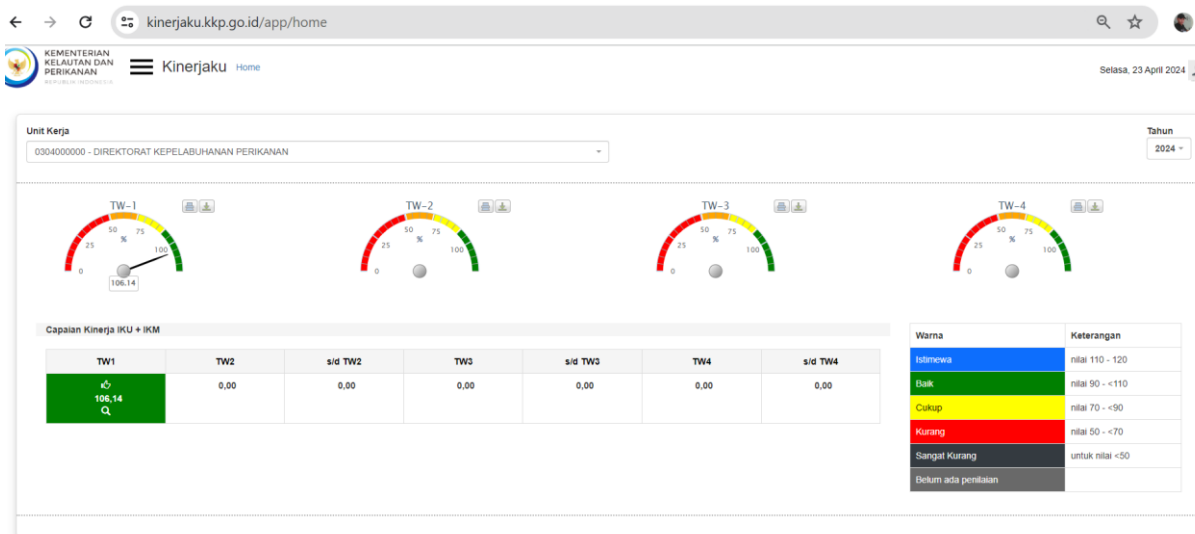
Gambar 2. Perjanjian Kinerja Direktur Kepelabuhanan Perikanan Tahun 2024
 (Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2024)

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan pada tahun 2023 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Kepelabuhanan Perikanan menitik beratkan pada 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dan 4 (empat) Indikator Kinerja untuk

menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II dalam bentuk dashboard sebagai berikut:



Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan I Tahun 2024

(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024)

Capaian kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada triwulan I tahun 2024 masih dalam kategori baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK sebesar 106,14%. capaian Kinerja IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Pada triwulan I Tahun 2024, terdapat 3 dari 22 IKU Direktorat Kepelabuhanan yang dapat di hitung capaiannya. Ini dikarenakan 3 IKU tersebut targetnya di hitung dalam waktu triwulanan, sedangkan yang 19 IKU lain di hitung dalam waktu tahunan dan semesteran.

Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada triwulan I tahun 2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan Triwulan I Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Waktu Pengukuran	Target	Target	Capaian	
				TW I	TW I	%
1 Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal	1 Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	Triwulan	6	0,9	0,9	100
	2 Persentase Pembangunan SKPT (persen)	Tahunan	85			
2 Pengelolaan pelabuhan perikanan yang berdaya saing	3 Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen)	Tahunan	35			
	4 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)	Tahunan	2			
	5 Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)	Tahunan	28			
	6 Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)	Tahunan	48			
	7 Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)	Tahunan	15			
	8 Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)	Tahunan	40			
	9 Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Persen)	Tahunan	78			
	10 Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port	Tahunan	77			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Waktu Pengukuran	Target	Target	Capaian	
				TWI	TWI	%
	State Measures Agreement (PSMA) (Persen)					
	11 Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)	Tahunan	77			
3 Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal	12 Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan)	Tahunan	296			
	13 Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)	Tahunan	90			
	14 Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (Nilai/Skala)	Tahunan	89			
	15 Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	Tahunan	100			
	16 Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)	Tahunan	100			
4 Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan	17 Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan KP (orang)	Tahunan	422			

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Waktu Pengukuran	Target	Capaian		
					Target TW I	TW I	%
5 Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Kelabuhanan Perikanan	18	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan (Nilai)	Tahunan	94			
	19	IP ASN Direktorat Kelabuhanan Perikanan (indeks)	Semester	84			
	20	Persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	Triwulan	94	94	133,33	141,84
	21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan (persen)	Triwulan	80	80	83,63	104,54
	22	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kelabuhanan Perikanan (persen)	Semester	98			

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan Triwulan I Tahun 2024 yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), nilai yang diperoleh adalah sebesar **106,14**

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja adalah proses evaluasi yang mengukur sejauh mana suatu organisasi atau individu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam analisis ini, data kinerja dicermati untuk menilai pencapaian target, identifikasi masalah, dan perbaikan yang diperlukan. Dengan melibatkan pengukuran kuantitatif dan kualitatif, analisis capaian kinerja membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan strategis, dan pengembangan program perbaikan. Hal ini menjadi alat penting dalam mengukur efisiensi dan efektivitas suatu entitas, baik dalam sektor bisnis, pemerintahan, maupun sektor sosial, serta membantu memastikan perbaikan berkelanjutan dalam pencapaian tujuan. Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran Kegiatan (SK-1) : Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan yang Optimal

A. Persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan Fasilitasnya

Sasaran Kegiatan Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan merupakan tujuan dari program Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, sasaran ini memiliki Indikator Kinerja, yaitu **Persentase Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya**.

Indikator ini menunjukkan persentase pembinaan pengembangan pelabuhan perikanan guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan. Adapun metode perhitungan yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan jumlah lokasi capaian pengembangan di Pelabuhan Perikanan berupa salah satu kegiatan:

1. Analisis dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan
2. Penyiapan dokumen tender/pengadaan pelabuhan perikanan
3. Pembahasan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan
4. Pembinaan pembangunan di pelabuhan perikanan
5. Pengendalian pembangunan di pelabuhan perikanan
6. Monitoring dan Evaluasi Progres Kegiatan Pembangunan
7. Supervisi Kegiatan Pembangunan

Indikator ini pada tahun Triwulan I Tahun 2024 ditargetkan sebesar 0,9%. Penghitungan didasarkan pada jumlah lokasi pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (**Rpp**) dibandingkan dengan jumlah lokasi pelabuhan perikanan yang dibangun oleh pemerintah dan melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah laut berdasarkan Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (**Rrippn**) 642 PP bersifat kumulatif.

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Rpp}}{\text{Rrippn}} \times 100\%$$

Pada triwulan I Tahun 2024, telah dilaksanakan pembahasan dan analisis dokumen rencana awal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik subbidang Perikanan Tangkap (pembangunan/pengembangan PP UPT Daerah. Selanjutnya telah dibahas mengenai pembahasan rencana pengembangan fasilitas PP UPT Pusat yang dilaksanakan di Yogyakarta dengan mengundang 22 Satuan Kerja (PP UPT Pusat dan PP Perintis). Untuk

tahapan selanjutnya akan dilakukan penyiapan dokumen tender/pengadaan pelabuhan perikanan.

Tabel 3. Capaian IKU “Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)” sampai dengan triwulan I tahun 2024

Nama IKU	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)	0,9	0,9	100

(Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2024)

Tabel 4. Perbandingan Capaian IKU “Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya” sampai dengan triwulan I Tahun 2024

SS 1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang optimal										
IKU 1	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (persen)										
Realisasi TW I 2019-2023					Realisasi 2024				Renstra DJPT		
TW I 2019	TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	Target Tahun 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd Target TW I 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra	
-	-	-	8	3	6	0,9	0,9	100			

B. Persentase Pembangunan SKPT (Persen)

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase progress pembangunan pelabuhan perikanan di SKPT guna mendukung operasional dan pelayanan sesuai dengan fungsi Pelabuhan Perikanan.

Jumlah capaian progress pembangunan pelabuhan perikanan SKPT meliputi:

1. Penyiapan dokumen lelang pembangunan SKPT
2. Penandatanganan kontrak
3. Pembahasan dan koordinasi pelaksanaan konstruksi
4. Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan konstruksi
5. Serah Terima Pekerjaan

Cara menghitung persentase progress Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) adalah jumlah capaian progres Pembangunan di 4 lokasi SKPT dibagi dengan 4 lokasi SKPT.

$$PSKPT = \frac{\sum PFP}{4} \times 100\%$$

Pada Triwulan I Tahun 2024 belum dilakukan perhitungan pada IKU Persentase Pembangunan SKPT, dikarenakan IKU ini ditetapkan ditargetkan tahunan. Namun,

beberapa pekerjaan telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini pada triwulan I sebagai berikut:

1. SKTP Sabang
 - Telah dilakukan analisis dokumen perencanaan
 - Penyiapan tender; dan
 - Mereview hasil pemenang tender
2. SKPT Moa
 - Melaksanakan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan SKPT Moa;
 - Melaksanakan pengendalian terhadap kontrak kritis yang sedang dialami SKPT Moa;
 - Melakukan pendampingan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Minggu ke-61
3. SKPT Saumlaki
 - Melaksanakan persiapan serah terima parsial/sebagian terhadap bangunan yang sudah selesai dalam pelaksanaan pembangunannya;
 - Melaksanakan pendampingan terhadap reviu itjen atas Permohonan termin III Kontraktor penyedia;
 - Melakukan pendampingan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Minggu ke-77
4. SKPT Morotai
 - Melaksanakan pendampingan terhadap reviu itjen terkait administrasi Termin II SKPT Morotai;
 - Melakukan pendampingan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Minggu ke-64

3.2.2 Sasaran Kegiatan (SK-2): Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Berdaya Saing

A. Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (Persen).

Indikator ini menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan rencana pembangunan dan/atau pengembangannya. Identifikasi pelabuhan perikanan meliputi:

1. Analisis kebutuhan pembangunan dan/atau pengembangan Pelabuhan perikanan.
2. Pembahasan dan koordinasi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan.

Cara penghitungannya adalah Jumlah pelabuhan perikanan yang telah dianalisis kebutuhan pembangunan dan/atau **(Rppa)** pengembangannya dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan berdasarkan Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional **(Rrippn)**

Pada Triwulan I Tahun 2024 belum dilakukan perhitungan pada IKU Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan, dikarenakan IKU ini ditetapkan targetnya tahunan. Namun kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen perencanaan Kantor Pelayanan Kesyahbandaran dan PNBP Pasca Produksi (KPSP) di 5 (lima) lokasi yaitu PP Muara Angke, PP Karangsong, PP Sorong, PP Baran dan PP Dobo berupa DED dan Gambar design sebagai dasar pelaksanaan konstruksi pembangunan KPSP.
2. Sinkronisasi block plan Pelabuhan Perikanan (PP) berdasarkan *master plan* dan kondisi eksisting yang sudah terbangun di 2 (dua) lokasi yaitu PPN Ternate dan PPN Brondong.
3. Penyusunan deliniasi (garis batas) wilayah PP di 2 (dua) lokasi yaitu PPN Ternate dan PPN Brondong.
4. Pembahasan rencana awal Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik subbidang Perikanan Tangkap (pembangunan/pengembangan PP UPT Daerah)
5. Pembahasan rencana pengembangan fasilitas PP UPT Pusat yang dilaksanakan di Yogyakarta dengan mengundang 22 Satuan Kerja (PP UPT Pusat dan PP Perintis).

B. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan (Dokumen)

Indikator ini menunjukkan tersedianya dokumen rencana dan konsep pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan. Jumlah dokumen perencanaan dan/atau pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan meliputi dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan diantaranya studi kelayakan, dokumen lingkungan, KKRL, WKOPP, masterplan dan DED.

Pada Tahun 2024, IKU Rencana pembangunan dan pengembangan Pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan ditetapkan target sebanyak 2 Dokumen, sehingga pada triwulan I Tahun 2024 belum dilakukan. Namun kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan survey lapangan dalam rangka penyusunan WKOPP PP Daeo Majiko;
2. Penyusunan deliniasi (garis batas) PP Daeo Majiko;
3. Pembahasan hasil identifikasi dan survey lapangan penyusunan WKOPP Daeo Majiko

C. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum (Persen)

Persentase pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum dihitung berdasarkan capaian tingkat operasional pelabuhan perikanan dibandingkan dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tercantum dalam RIPPN. Pelabuhan Perikanan dengan tingkat operasional optimum dilihat dari beberapa aspek meliputi:

- a. Fasilitas minimal Pelabuhan perikanan;
- b. Kriteria teknis;
- c. Kriteria operasional;
- d. Kelembagaan;
- e. Sumber Daya Manusia; dan
- f. Anggaran Operasional

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I untuk mencapai target jumlah pelabuhan perikanan dengan tingkat operasional optimum antara lain:

1. Tingkat operasional optimum pelabuhan perikanan;

- a. Rapat Pembahasan telaahan RPERMEN KP dan kajian teknis tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya di Bidang Kepelabuhanan Perikanan tanggal 27 Maret 2024;
- b. Penyampaian Data Kapal yang Tersertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Tahun 2019 – 2023;
- c. Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan kepada Kepala Pusat Pengendalian Mutu – BPPMHKP nomor: B.477/DJPT.4/PI.330/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 perihal Permohonan data kapal yang berafiliasi dengan supplier pemasok bahan baku ke UPI yang memiliki nomor registrasi untuk ekspor ke UE;
- d. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada tanggal 25 Maret 2024;

2. Nomor pendaftaran calon pembangun dan pengelola SPBUN;

- a. Surat pendafatran nomor rekomendasi calon pembangunan dan pengelola SPBUN sebanyak 33 surat di 13 Provinsi; dan
- b. Surat Direktur Kepelabuhan Perikanan kepada seluruh DKP Provinsi nomor: B.1225/DJPT.4/PI.320/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal permintaan laporan pengelolaan SPBUN di Provinsi.

3. Peningkatan atau penetapan kelas pelabuhan perikanan milik Pemerintah dan penetapan pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah;

- a. Kronologis Usulan Peningkatan Kelas dan Penetapan Pelabuhan Perikanan Yang Tidak Dibangun Oleh Pemerintah;

- b. Surat Direktur Kelabuhanan Perikanan nomor: B.309/DJPT.4/PI.340/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 kepada DKP Provinsi Jawa Tengah perihal Tanggapan Usulan Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Larangan;
- c. Surat Direktur Kelabuhanan Perikanan kepada 24 DKP Provinsi perihal Penetapan atau Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan agar melakukan identifikasi kriteria teknis dan operasional PP di provinsi masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5. Identifikasi kriteria teknis dan operasional Pelabuhan Perikanan.

No	Provinsi	Surat Dir. Kelabuhanan Perikanan	Tanggal	Proyeksi tahapan pembangunan, pengembangan, dan klasifikasi pelabuhan perikanan tahun 2024-2028
1	Aceh	B.376/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	18 pelabuhan perikanan yang akan menjadi PPI
2	Banten	B.323/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	6 PP yang akan menjadi PPI
3	Bengkulu	B.327/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	4 PP yang akan menjadi PPI
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	B.332/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	2 PP yang akan menjadi PPP
5	Gorontalo	B.377/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	3 PP yang akan menjadi PPI
6	Jawa Tengah	B.255/DJPT.4/PI.340/I/2024	22 Januari 2024	1 PPP yang akan menjadi PPN, 1 PP yang akan menjadi PPP dan 59 PP yang akan menjadi PPI
7	Jawa Timur	B.324/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	2 PPI yang akan menjadi PPP, 6 PP yang akan menjadi PPP, dan 9 PP yang akan menjadi PPI;
8	Kalimantan Barat	B.325/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	8 PP yang akan menjadi PPI
9	Kalimantan Tengah	B.331/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	6 PP yang akan menjadi PPI
10	Kalimantan Timur	B.329/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	2 PP yang akan menjadi PPI
11	Kepulauan Bangka Belitung	B.328/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	1 PP yang akan menjadi PPP dan 3 PP yang akan menjadi PPI
12	Maluku	B.382/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	8 PP yang akan menjadi PPI dan 1 CP yang akan menjadi PPI
13	Maluku Utara	B.381/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	9 PP yang akan menjadi PPI
14	Nusa Tenggara Timur	B.369/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	2 PP yang akan menjadi PPP, 7 PP yang akan menjadi PPI

No	Provinsi	Surat Dir. Kepelabuhanan Perikanan	Tanggal	Proyeksi tahapan pembangunan, pengembangan, dan klasifikasi pelabuhan perikanan tahun 2024-2028
				dan 11 CP yang akan menjadi PPI.
15	Papua	B.386/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	4 PP yang akan menjadi PPI
16	Papua Barat	B.383/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	3 PP yang akan menjadi PPI
17	Papua Barat Daya	B.385/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	2 PP yang akan menjadi PPI
18	Papua Tengah	B.384/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	2 PP yang akan menjadi PPI
19	Sulawesi Barat	B.378/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	1 PP yang akan menjadi PPP dan 2 PP yang akan menjadi PPI
20	Sulawesi Selatan	B.373/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	17 PP yang akan menjadi PPI
21	Sulawesi Tengah	B.379/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	2 PP yang akan menjadi PPI
22	Sulawesi Tenggara	B.372/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	21 PP yang akan menjadi PPI
23	Sulawesi Utara	B.371/DJPT.4/PI.340/I/2024	30 Januari 2024	10 PP yang akan menjadi PPI
24	Sumatera Barat	B.326/DJPT.4/PI.340/I/2024	26 Januari 2024	1 PPI yang akan menjadi PPP dan 3 PP yang akan menjadi PPI

- d. Rapat Koordinasi Penetapan atau Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan Tahun 2024 pada tanggal 29 Februari 2024 dengan seluruh DKP Provinsi;
- e. Pembahasan Usulan Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Gesing di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY pada tanggal 04 Maret 2024.

4. Pengawasan dan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan

- a. Sosialisasi Implementasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (Selaraskan) pada tanggal 01 Februari 2024 kepada PP UPT Daerah dan PP Perintis;
- b. Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan nomor: B.658/DJPT.4/PI.330/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 kepada PP UPT Daerah dan PP Perintis perihal Implementasi Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN);
- c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis CPIB dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan serta K5 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan pada tanggal 05 - 08 Maret 2024;
- d. Surat Direktur Kepelabuhanan Perikanan nomor B.1101/DJPT.4/PI.330/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 kepada PP UPT Pusat perihal Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Tahun 2024;
- e. Menghitung capaian dan hasil evaluasi SELARASKAN triwulan I TA. 2024 di 22 PP UPT Pusat.

D. Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (Persen)

Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan merupakan tingkat pelayanan perusahaan pelabuhan perikanan yang dilaksanakan terhadap UPT Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Perintis yang terdiri dari:

1. Tingkat kualitas waktu pelayanan penerbitan surat balasan terhadap rekomendasi penggunaan tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Perikanan;
2. Tingkat kepatuhan penggunaan tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Perikanan;
3. Tingkat pelayanan yang terstandarkan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 dalam mendukung indikator kinerja Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan antara lain:

1. Penyusunan SOP terkait penggunaan tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Perikanan yang terdiri dari:
 - a. SOP yang penetapannya dilakukan oleh Kepala UPT Pelabuhan Perikanan atau Penanggung Jawab Pengelola Pelabuhan Perikanan Perintis:
 - 1) Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan berukuran <math><100\text{ m}^2</math> di UPT Pelabuhan Perikanan;
 - 2) Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan berukuran <math><100\text{ m}^2</math> di PP Perintis;
 - 3) Rekomendasi Penggunaan Tanah berukuran ≥ 100 s.d 2000 m^2 dan/atau Bangunan berukuran ≥ 100 s.d 200 m^2 di UPT Pelabuhan Perikanan;
 - 4) Rekomendasi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan berukuran ≥ 100 s.d 2000 m^2 di PP Perintis;

- 5) Rekomendasi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan berukuran $\geq 2000 \text{ m}^2$ di UPT Pelabuhan Perikanan;
 - 6) Rekomendasi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan berukuran $\geq 2.000 \text{ m}^2$ di Pelabuhan Perikanan Perintis;
 - 7) Penerbitan Perjanjian Penggunaan Tanah atau Bangunan yang berukuran selain $< 100 \text{ m}^2$ di UPT Pelabuhan Perikanan; dan
 - 8) Penerbitan Perjanjian Penggunaan Tanah dan atau Bangunan yang berukuran selain $< 100 \text{ m}^2$ di Pelabuhan Perikanan Perintis.
- b. SOP yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Kepelabuhanan Perikanan:
- 1) Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah Berukuran $\geq 100 \text{ m}^2$ s.d 2.000 m^2 dan/atau Bangunan $\geq 100 \text{ m}^2$ s.d 200 m^2 ; dan
 - 2) Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah Berukuran $\geq 2.000 \text{ m}^2$ dan/atau Bangunan $\geq 200 \text{ m}^2$.
2. Hasil draft SOP dapat dilihat melalui tautan http://ndrive.kkp.go.id/index.php/s/SOP_BOGOR;
 3. Telah dilakukan pengesahan terhadap SOP pelayanan yang dilakukan di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan:
 - a. Nomor SOP: B.417/DJPT.4/OT.310/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan nama SOP Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah Berukuran $\geq 100 \text{ m}^2$ s.d 2.000 m^2 dan/atau Bangunan $\geq 100 \text{ m}^2$ s.d 200 m^2 ;
 - b. Nomor SOP: B.434/DJPT.4/OT.310/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan nama SOP Persetujuan Prinsip Penggunaan Tanah Berukuran $\geq 2.000 \text{ m}^2$ dan/atau Bangunan $\geq 200 \text{ m}^2$.
 4. Evaluasi berkala (triwulanan) terhadap pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Perikanan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Perikanan;
 5. Melakukan proses sertifikasi manajemen pelayanan ISO 9001:2015 terhadap pelayanan yang dilakukan di Direktorat Kepelabuhanan Perikanan meliputi pelayanan penerbitan persetujuan prinsip penggunaan tanah dan/atau bangunan di Pelabuhan Perikanan dan pelayanan penetapan/peningkatan kelas Pelabuhan Perikanan.

E. Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Kinerja Baik (Persen)

Indikator ini menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan dengan Tingkat kinerja minimal baik berdasarkan aplikasi PIPP. Pengukuran indikator ini dilakukan dalam waktu tahunan dengan target indikator adalah 15 %, sehingga belum dilakukan penghitungan pada triwulan I Tahun 2024. Berikut data pelabuhan perikanan yang telah melakukan input data pada aplikasi PIPP sampai dengan bulan Maret Tahun 2024.

Tabel 6. Pelabuhan Perikanan yang melakukan input data pada aplikasi PIPP

NO	PELABUHAN PERIKANAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	RATA-RATA	KATEGORI
1	PPS. Nizam Zachman Jakarta	89,00	91,75	88,50	89,75	SANGAT BAIK
2	PPS. Lampulo/Kutaraja	57,25	50,00	55,00	54,08	SEDANG
3	PPS. Kendari	92,75	88,75	92,75	91,42	SANGAT BAIK
4	PPS. Cilacap	88,25	86,00	89,25	87,83	SANGAT BAIK
5	PPS. Bungus	72,50	78,25	79,00	76,58	BAIK
6	PPS. Bitung	93,00	93,00	94,00	93,33	SANGAT BAIK
7	PPS. Belawan	77,75	77,75	82,75	79,42	BAIK
8	PPN. Tual	67,75	64,75	66,50	66,33	BAIK
9	PPN. Ternate	95,00	95,00	96,25	95,42	SANGAT BAIK
10	PPN. Tanjungpandan	88,50	89,75	89,75	89,33	SANGAT BAIK
11	PPN. Sungailiat	91,00	89,75	88,50	89,75	SANGAT BAIK
12	PPN. Sibolga	93,75	93,25	94,75	93,92	SANGAT BAIK
13	PPN. Prigi	93,00	92,75	93,75	93,17	SANGAT BAIK
14	PPN. Pengambengan	91,00	93,00	75,50	86,50	SANGAT BAIK
15	PPN. Pemangkat	89,75	89,25	90,50	89,83	SANGAT BAIK
16	PPN. Pekalongan	91,75	91,75	91,75	91,75	SANGAT BAIK
17	PPN. Palabuhanratu	85,50	85,50	87,25	86,08	SANGAT BAIK
18	PPN. Muara Angke	67,25	68,75	66,25	67,42	BAIK
19	PPN. Merauke	48,50	49,75	51,00	49,75	SEDANG
20	PPN. Kwandang	86,75	85,75	85,75	86,08	SANGAT BAIK
21	PPN. Kejawanan	89,50	89,25	88,25	89,00	SANGAT BAIK

NO	PELABUHAN PERIKANAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	RATA-RATA	KATEGORI
22	PPN. Karangantu	85,75	87,50	87,50	86,92	SANGAT BAIK
23	PPN. Idi	55,25	62,50	54,00	57,25	SEDANG
24	PPN. Brondong	92,00	90,75	95,00	92,58	SANGAT BAIK
25	PPN. Ambon	87,25	90,25	90,25	89,25	SANGAT BAIK
26	PPP. Wonokerto	87,25	89,50	90,50	89,08	SANGAT BAIK
27	PPP. Tumumpa	58,25	59,00	57,50	58,25	SEDANG
28	PPP. Tobelo	52,25	52,25	52,75	52,42	SEDANG
29	PPP. Teluk Batang	73,25	78,25	82,25	77,92	BAIK
30	PPP. Tegalsari	92,00	95,00	95,00	94,00	SANGAT BAIK
31	PPP. Tawang	70,25	71,75	74,25	72,08	BAIK
32	PPP. Tasik Agung	86,25	94,75	96,00	92,33	SANGAT BAIK
33	PPP. Tamperan	67,00	90,50	87,25	81,58	BAIK
34	PPP. Sungai Rengas	61,25	71,50	70,25	67,67	BAIK
35	PPP. Sorong	69,25	78,25	71,50	73,00	BAIK
36	PPP. Sadeng	63,50	61,50	63,00	62,67	SEDANG
37	PPP. Pulau Baai	48,75	52,50	54,50	51,92	SEDANG
38	PPP. Pondok Dadap	64,25	87,50	88,75	80,17	BAIK
39	PPP. Ogotua	51,75	52,25	52,25	52,08	SEDANG
40	PPP. Muncar	86,00	92,00	92,00	90,00	SANGAT BAIK
41	PPP. Morodemak	67,25	59,00	58,75	61,67	SEDANG
42	PPP. Mayangan	97,75	97,75	97,75	97,75	SANGAT BAIK
43	PPP. Lempasing	59,75	61,25	65,25	62,08	SEDANG
44	PPP. Lekok	53,75	55,00	55,00	54,58	SEDANG
45	PPP. Labuhanhaji	56,00	54,50	55,75	55,42	SEDANG
46	PPP. Labuhan Maringgai	49,00	47,50	47,00	47,83	SEDANG
47	PPP. Labuhan Lombok	63,25	61,00	61,00	61,75	SEDANG
48	PPP. Kota Agung	54,75	53,50	53,50	53,92	SEDANG
49	PPP. Klidang Lor	96,75	97,50	96,50	96,92	SANGAT BAIK
50	PPP. Karimun Jawa	72,75	75,25	69,75	72,58	BAIK
51	PPP. Eretan (Wetan/Kulon)	53,50	51,75	51,75	52,33	SEDANG
52	PPP. Dobo	63,75	74,75	74,00	70,83	BAIK
53	PPP. Bulu	70,50	70,50	70,50	70,50	BAIK
54	PPP. Blanakan	58,25	50,50	0,00	36,25	KURANG
55	PPP. Batulicin	88,75	90,75	87,25	88,92	SANGAT BAIK
56	PPP. Bajomulyo	90,50	89,00	87,00	88,83	SANGAT BAIK

NO	PELABUHAN PERIKANAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	RATA-RATA	KATEGORI
57	PPP. Bacan	86,00	86,00	87,00	86,33	SANGAT BAIK
58	PPP. Asem Doyong	65,75	75,75	70,25	70,58	BAIK
59	PPI. Tilmuta	61,50	61,50	61,50	61,50	SEDANG
60	PPI. Tenda	63,50	63,50	63,50	63,50	SEDANG
61	PPI. Tanjung Luar	49,75	46,00	51,50	49,08	SEDANG
62	PPI. Tanjung Limau	90,75	80,25	88,50	86,50	SANGAT BAIK
63	PPI. Tanjung Balai Asahan	49,00	46,50	54,00	49,83	SEDANG
64	PPI. Sungai Selan	35,75	0,00	0,00	11,92	KURANG
65	PPI. Sodohoa	54,00	50,50	50,50	51,67	SEDANG
66	PPI. Selili	58,25	64,25	68,50	63,67	SEDANG
67	PPI. Sambaliung	63,75	62,50	67,75	64,67	SEDANG
68	PPI. Pusong	66,25	70,50	71,50	69,42	BAIK
69	PPI. Pasongsongan	61,00	57,50	58,75	59,08	SEDANG
70	PPI. Paranggi	58,75	52,50		55,63	SEDANG
71	PPI. Muara Piluk Bakauheni	44,25	39,25	39,00	40,83	KURANG
72	PPI. Muara Kintap	57,00	72,00	70,50	66,50	BAIK
73	PPI. Kumai	56,50	60,50	0,00	39,00	KURANG
74	PPI. Kuala Pembuang	67,25	73,50	71,50	70,75	BAIK
75	PPI. Gentuma	59,25	59,25	58,00	58,83	SEDANG
76	PPI. Donggala	63,75	63,50	62,25	63,17	SEDANG
77	PPI. Banjarmasin	65,25	66,75	69,50	67,17	BAIK
78	PP. Wameo	48,25	49,50	49,75	49,17	SEDANG
79	PP. Untia	87,75	70,00	78,25	78,67	BAIK
80	PP. Ujung Batu	37,25	41,25	43,00	40,50	KURANG
81	PP. Tual	31,50	28,25	28,25	29,33	KURANG
82	PP. Tengkeyu II	60,25	60,25	60,25	60,25	SEDANG
83	PP. Tenau Kupang	60,50	64,50	66,75	63,92	SEDANG
84	PP. Teluk Sinabang (Lugu)	46,75	44,25	43,25	44,75	KURANG
85	PP. Teluk Awang	69,00	73,50	69,00	70,50	BAIK
86	PP. Tambakrejo	88,50	86,00	86,00	86,83	SANGAT BAIK
87	PP. Sungai Jawi	32,25	0,00	0,00	10,75	KURANG
88	PP. Selat Nasik	42,75	41,00	43,75	42,50	KURANG
89	PP. Selat Lampa	71,25	73,25	78,75	74,42	BAIK
90	PP. Selakau	46,75	47,25	43,00	45,67	KURANG
91	PP. Sebatik	74,50	78,50	77,50	76,83	BAIK
92	PP. Sawang Ba'u	37,75	37,75	36,50	37,33	KURANG
93	PP. Sarang	51,50	47,75	52,50	50,58	SEDANG
94	PP. Sape	58,00	60,50	56,00	58,17	SEDANG
95	PP. Sanggeng	46,25	45,75	40,50	44,17	KURANG
96	PP. Sangatta	73,50	77,75	72,50	74,58	BAIK
97	PP. Poumako	55,50	51,75	50,25	52,50	SEDANG
98	PP. Popoh	82,00	86,00	86,50	84,83	BAIK

NO	PELABUHAN PERIKANAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	RATA-RATA	KATEGORI
99	PP. Pancer	78,50	81,50	78,50	79,50	BAIK
100	PP. Oeba	55,50	55,75	56,75	56,00	SEDANG
101	PP. Marisa	39,50	40,75	42,00	40,75	KURANG
102	PP. Manggar Baru	68,50	78,50	66,25	71,08	BAIK
103	PP. Lonrae	66,75	65,50	65,25	65,83	SEDANG
104	PP. Logending	77,50	75,50	74,50	75,83	BAIK
105	PP. Larangan	91,50	91,50	92,25	91,75	SANGAT BAIK
106	PP. Lappa	63,25	63,25	62,50	63,00	SEDANG
107	PP. Kuala Tungkal	68,50	67,00	68,50	68,00	BAIK
108	PP. Kuala Peukan Baro	58,25	67,25	64,25	63,25	SEDANG
109	PP. Kronjo	50,50	49,50	48,00	49,33	SEDANG
110	PP. Kluwut	49,00	49,50	49,25	49,25	SEDANG
111	PP. Klademak	66,50	67,75	69,00	67,75	BAIK
112	PP. Kijang Bintan	47,50	48,25	48,25	48,00	SEDANG
113	PP. Keude Meukek	45,25	44,00	44,00	44,42	KURANG
114	PP. Kema	57,50	58,25	59,25	58,33	SEDANG
115	PP. Kasiwa (Kasiwah)	47,00	49,50	49,25	48,58	SEDANG
116	PP. Karangsong	67,25	67,25	68,25	67,58	BAIK
117	PP. Karanganyar	54,50	55,75	56,75	55,67	SEDANG
118	PP. Jakabaring	41,75	53,00	36,25	43,67	KURANG
119	PP. Inengo	53,00	53,00	53,00	53,00	SEDANG
120	PP. Grajagan	58,75	0,00	57,75	38,83	KURANG
121	PP. Goto	51,75	52,50	48,75	51,00	SEDANG
122	PP. Fandoi	58,00	57,00	58,25	57,75	SEDANG
123	PP. Dufa-Dufa	52,25	47,25	53,75	51,08	SEDANG
124	PP. Dodepo	39,50	32,25	39,50	37,08	KURANG
125	PP. Cikidang	66,50	38,00	54,00	52,83	SEDANG
126	PP. Cempae	50,25	62,00	51,50	54,58	SEDANG
127	PP. Camplong	49,50	58,50	57,50	55,17	SEDANG
128	PP. Bonto Bahari Maros	18,25	29,75	27,50	25,17	KURANG
129	PP. Binuangeun	51,00	48,00	43,50	47,50	SEDANG
130	PP. Benjina	30,50			30,50	KURANG
131	PP. Belang	47,50	52,50	52,50	50,83	SEDANG
132	PP. Beba	56,25			56,25	SEDANG
133	PP. Bareleng	59,00	57,75	57,75	58,17	SEDANG
134	PP. Baran	34,00	31,25	37,25	34,17	KURANG
135	PP. Api-Api	67,50	15,25	59,50	47,42	SEDANG
136	PP. Amurang	49,75	50,50	50,50	50,25	SEDANG
137	PP. Dompok	42,25	32,25	44,25	39,58	KURANG
138	PU. Tanjung Wangi	0,00	0,00	0,00	0,00	KURANG
139	PU. Labuan Uki	0,00	41,00	0,00	13,67	KURANG
140	PU. Benoa	0,00	0,00	0,00	0,00	KURANG
141	PPP. Puger	0,00	53,50	54,50	36,00	KURANG

NO	PELABUHAN PERIKANAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	RATA-RATA	KATEGORI
142	PPI. Palipi	0,00	27,75	31,25	19,67	KURANG
143	PPI. Manggar	0,00	53,75	57,25	37,00	KURANG
144	PP. Sungai Kakap	0,00	36,00	44,00	26,67	KURANG
145	PP. Gantung	0,00	48,75	48,75	32,50	KURANG
146	PPI Kota Baru	0,00		48,50	24,25	KURANG
147	PP Moro	0,00		29,50	14,75	KURANG
148	PP Campurejo	0,00		40,75	20,38	KURANG
149	PP Banyusangkah	0,00		44,50	22,25	KURANG

F. Persentase Pelabuhan Perikanan Yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (Persen)

Indikator ini menunjukkan jumlah pelabuhan perikanan yang melakukan input data produksi kedalam aplikasi data PIPP. Cara menghitungnya adalah pelabuhan perikanan non calon pelabuhan perikanan (40% dari RIPP No. 132/2023) sebanyak 450 lokasi.

Pengukuran indikator ini dilakukan dalam waktu tahunan dengan target indikator 40% pada tahun 2024, sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan I. Namun, sampai dengan bulan maret 2024, sudah ada 149 pelabuhan perikanan yang melakukan input data di aplikasi PIPP sebagai berikut.

Tabel 7. Daftar PP yang melakukan input data di aplikasi PIPP.

NO	PELABUHAN PERIKANAN YANG MELAKUKAN INPUT DATA DI APLIKASI PIPP
1	PPS. Nizam Zachman Jakarta
2	PPS. Lampulo/Kutaraja
3	PPS. Kendari
4	PPS. Cilacap
5	PPS. Bungus
6	PPS. Bitung
7	PPS. Belawan
8	PPN. Tual
9	PPN. Ternate
10	PPN. Tanjungpandan
11	PPN. Sungailiat
12	PPN. Sibolga
13	PPN. Prigi
14	PPN. Pengambengan
15	PPN. Pemangkat
16	PPN. Pekalongan
17	PPN. Palabuhanratu
18	PPN. Muara Angke
19	PPN. Merauke
20	PPN. Kwandang
21	PPN. Kejawanan

NO	PELABUHAN PERIKANAN YANG MELAKUKAN INPUT DATA DI APLIKASI PIPP
22	PPN. Karangantu
23	PPN. Idi
24	PPN. Brondong
25	PPN. Ambon
26	PPP. Wonokerto
27	PPP. Tumumpa
28	PPP. Tobelo
29	PPP. Teluk Batang
30	PPP. Tegalsari
31	PPP. Tawang
32	PPP. Tasik Agung
33	PPP. Tamperan
34	PPP. Sungai Rengas
35	PPP. Sorong
36	PPP. Sadeng
37	PPP. Pulau Baai
38	PPP. Pondok Dadap
39	PPP. Ogotua
40	PPP. Muncar
41	PPP. Morodemak
42	PPP. Mayangan
43	PPP. Lempasing
44	PPP. Lekok
45	PPP. Labuhanhaji
46	PPP. Labuhan Maringgai
47	PPP. Labuhan Lombok
48	PPP. Kota Agung
49	PPP. Klidang Lor
50	PPP. Karimun Jawa
51	PPP. Eretan (Wetan/Kulon)
52	PPP. Dobo
53	PPP. Bulu
54	PPP. Blanakan
55	PPP. Batulicin
56	PPP. Bajomulyo
57	PPP. Bacan
58	PPP. Asem Doyong
59	PPI. Tilamuta
60	PPI. Tenda
61	PPI. Tanjung Luar
62	PPI. Tanjung Limau
63	PPI. Tanjung Balai Asahan
64	PPI. Sungai Selan
65	PPI. Sodohoa
66	PPI. Selili

NO	PELABUHAN PERIKANAN YANG MELAKUKAN INPUT DATA DI APLIKASI PIPP
67	PPI. Sambaliung
68	PPI. Pusong
69	PPI. Pasongsongan
70	PPI. Paranggi
71	PPI. Muara Piluk Bakauheni
72	PPI. Muara Kintap
73	PPI. Kumai
74	PPI. Kuala Pembuang
75	PPI. Gentuma
76	PPI. Donggala
77	PPI. Banjarmasin
78	PP. Wameo
79	PP. Untia
80	PP. Ujung Batu
81	PP. Tual
82	PP. Tengayu II
83	PP. Tenau Kupang
84	PP. Teluk Sinabang (Lugu)
85	PP. Teluk Awang
86	PP. Tambakrejo
87	PP. Sungai Jawi
88	PP. Selat Nasik
89	PP. Selat Lampa
90	PP. Selakau
91	PP. Sebatik
92	PP. Sawang Ba'u
93	PP. Sarang
94	PP. Sape
95	PP. Sanggeng
96	PP. Sangatta
97	PP. Poumako
98	PP. Popoh
99	PP. Pancer
100	PP. Oeba
101	PP. Marisa
102	PP. Manggar Baru
103	PP. Lonrae
104	PP. Logending
105	PP. Larangan
106	PP. Lappa
107	PP. Kuala Tungkal
108	PP. Kuala Peukan Baro
109	PP. Kronjo
110	PP. Kluwut
111	PP. Klademak

NO	PELABUHAN PERIKANAN YANG MELAKUKAN INPUT DATA DI APLIKASI PIPP
112	PP. Kijang Bintan
113	PP. Keude Meukek
114	PP. Kema
115	PP. Kasiwa (Kasiwah)
116	PP. Karangsong
117	PP. Karanganyar
118	PP. Jakabaring
119	PP. Inengo
120	PP. Grajagan
121	PP. Goto
122	PP. Fandoi
123	PP. Dufa-Dufa
124	PP. Dodepo
125	PP. Cikidang
126	PP. Cempae
127	PP. Camplong
128	PP. Bonto Bahari Maros
129	PP. Binuangeun
130	PP. Benjina
131	PP. Belang
132	PP. Beba
133	PP. Bareleng
134	PP. Baran
135	PP. Api-Api
136	PP. Amurang
137	PP. Dompok
138	PU. Tanjung Wangi
139	PU. Labuan Uki
140	PU. Benoa
141	PPP. Puger
142	PPI. Palipi
143	PPI. Manggar
144	PP. Sungai Kakap
145	PP. Gantung
146	PPI Kota Baru
147	PP Moro
148	PP Campurejo
149	PP Banyusangkah

G. Tingkat Kinerja Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

Indikator kinerja tingkat kinerja kesyahbandaran pelabuhan perikanan adalah indikator yang dihitung berdasarkan dua komponen, yaitu peningkatan kapasitas SDM Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dengan bobot penilaian 40%, dan peningkatan jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan kesyahbandaran dengan bobot penilaian 60%.

Indikator kinerja ini perhitungannya dilakukan secara tahunan, dengan target ditetapkan sebesar 78%, sehingga pada triwulan I Tahun 2024 belum dilakukan diperhitungan.

H. Tingkat Kinerja Pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme *Port State Measures Agreement (PSMA)* (Persen)

Indikator Tingkat kinerja pelayanan kapal perikanan yang dilalui melalui mekanisme *Port State Measures Agreement (PSMA)* adalah Tingkat kinerja pelayanan kapal berbendara asing yang di layani melalui mekanisme PSMA dan dihitung berdasarkan dua komponen berikut:

1. Jumlah SDM yang memahami penerapan PSMA, dengan bobot penilaian 30%; dan
2. Survey kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan AREP, dengan bobot penilaian 70%.

Indikator kinerja ini perhitungannya dilakukan secara tahunan, dengan target ditetapkan sebesar 77%, sehingga pada triwulan I Tahun 2024 belum dilakukan diperhitungan.

I. Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) (Persen)

Indikator Tingkat kinerja Penerapan Pelaksananan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dihitung berdasarkan:

1. Peningkatan kapasitas SDM petugas SHTI yang ditetapkan, dengan bobot penilaian 30%;
2. Peningkatan jumlah SDM Operator LA, dengan bobot penilaian 50%; dan
3. Jumlah verifikasi SHTI dari negara importir, dengan bobot penilaian 20%.

Indikator kinerja ini perhitungannya dilakukan secara tahunan, dengan target ditetapkan sebesar 78%, sehingga pada triwulan I Tahun 2024 belum dilakukan diperhitungan.

3.2.3 Sasaran Kegiatan (SK-3): Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal

A. Pelabuhan Pangkalan Yang Menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (Pelabuhan)

Pelabuhan pangkalan yang menerapkan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) adalah pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi kriteria yaitu lokasi pangkalan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Indikator kinerja ini perhitungannya dilakukan secara tahunan, dengan target ditetapkan sebesar 296 Pelabuhan, sehingga pada triwulan I Tahun 2024 belum dilakukan diperhitungan. Berikut daftar 296 pelabuhan pangkalan yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP 187 Tahun 2023).

Tabel 8. Daftar Pelabuhan Pangkalan yang telah ditetapkan.

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
1	PP Kuala Tungkal	Provinsi Jambi	Zona 01	UPTD	Pendukung
2	PP Nipah Panjang	Provinsi Jambi	Zona 01	UPTD	Pendukung
3	PPN Pemangkat	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPT Pusat	Utama
4	PPP Sungai Rengas/ PP Sungai Jawi	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD dan UPTD	Pendukung
5	PPP Teluk Batang	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPT Pusat	Pendukung
6	PP Kuala Mempawah	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
7	PP Kuala Singkawang	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
8	PP Selakau	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
9	PP Suka Bangun	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
10	PP Sungai Duri	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
11	PP Sungai Kakap	Provinsi Kalimantan Barat	Zona 01	UPTD	Pendukung
12	PPN Sungailiat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPT Pusat	Pendukung
13	PPN Tanjungpandan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPT Pusat	Pendukung
14	PPP Muara Sungai Baturusa	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
15	PPI Manggar	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
16	PPI Sungai Selan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
17	PP Kurau	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
18	PP Sadai	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
19	PP Selat Nasik	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Zona 01	UPTD	Pendukung
20	PPI Tarempa	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
21	PP Baran	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
22	PP Barelang	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	Swasta	Utama
23	PP Dompok	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
24	PP Kijang Bintan	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
25	PP Moro	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
26	PP Pering Ranai	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
27	PP Selat Lampa	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	PP Perintis	Utama
28	PP Tajur Biru	Provinsi Kepulauan Riau	Zona 01	UPTD	Pendukung
29	PPI Sungsang	Provinsi Sumatera Selatan	Zona 01	UPTD	Pendukung
30	PP Jakabaring	Provinsi Sumatera Selatan	Zona 01	UPTD	Pendukung
31	PP Sungai Lumpur	Provinsi Sumatera Selatan	Zona 01	UPTD	Pendukung
32	PPN Kwandang	Provinsi Gorontalo	Zona 02	UPT Pusat	Utama
33	PPI Gentuma	Provinsi Gorontalo	Zona 02	UPTD	Pendukung
34	PPI Sambaliung	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 02	UPTD	Pendukung
35	PP Sebatik	Provinsi Kalimantan Utara	Zona 02	PP Perintis	Pendukung
36	PP Tengkeyu II	Provinsi Kalimantan Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
37	PP Fandoi	Provinsi Papua	Zona 02	UPTD	Utama
38	PP Hamadi Jayapura	Provinsi Papua	Zona 02	UPTD	Pendukung
39	PP Waiya Depapre	Provinsi Papua	Zona 02	UPTD	Pendukung
40	PP Sanggeng	Provinsi Papua Barat	Zona 02	UPTD	Pendukung
41	PP Waharia	Provinsi Papua Tengah	Zona 02	UPTD	Pendukung
42	PPP Ogotua	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 02	UPTD	Pendukung
43	PPP Tumumpa	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
44	PP Amurang	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
45	PP Dagho	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
46	PP Likupang	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
47	PP Salibabu	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
48	PP Ulu	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	UPTD	Pendukung
49	PU Labuhan Uki	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 02	Umum	Pendukung
50	PPI Tenda	Provinsi Gorontalo	Zona 03	UPTD	Pendukung
51	PPI Tilamuta	Provinsi Gorontalo	Zona 03	UPTD	Pendukung
52	PP Inengo	Provinsi Gorontalo	Zona 03	UPTD	Pendukung
53	PP Marisa	Provinsi Gorontalo	Zona 03	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
54	PPN Ambon	Provinsi Maluku	Zona 03	UPT Pusat	Utama
55	PPN Tual	Provinsi Maluku	Zona 03	UPT Pusat	Utama
56	PPP Dobo	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Utama
57	PPI Banda	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
58	PP Benjina	Provinsi Maluku	Zona 03	Swasta	Utama
59	PP Eri	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
60	PP Kalar Kalar	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
61	PP Kelfik Taar	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
62	PP Masarete	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
63	PP Masohi	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
64	PP Piru	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
65	PP Tamher Timur	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
66	PP Tual	Provinsi Maluku	Zona 03	Swasta	Utama
67	PP Tulehu	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
68	PP Ukurlaran	Provinsi Maluku	Zona 03	PP Perintis	Pendukung
69	PP Wetar	Provinsi Maluku	Zona 03	UPTD	Pendukung
70	PPN Ternate	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	UPT Pusat	Utama
71	PPP Bacan	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
72	PPP Tobelo	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
73	PP Daeo Majiko	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	PP Perintis	Pendukung
74	PP Dufa-Dufa	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
75	PP Goto	Provinsi Maluku Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
76	PP Dulanpompok	Provinsi Papua Barat	Zona 03	UPTD	Pendukung
77	PPP Sorong	Provinsi Papua Barat Daya	Zona 03	UPTD	Pendukung
78	PP Klademak	Provinsi Papua Barat Daya	Zona 03	UPTD	Pendukung
79	PPN Merauke	Provinsi Papua Selatan	Zona 03	PP Perintis	Utama
80	PP Poumako	Provinsi Papua Tengah	Zona 03	UPTD	Utama
81	PPI Pagimana	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
82	PPI Paranggi	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
83	PP Ampana	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
84	PP Bahari	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
85	PP Bente	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
86	PP Bualemo	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
87	PP Kolonodale	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
88	PP Mato	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
89	PP Moahino	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
90	PP Moilong	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
91	PP Toili	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 03	UPTD	Pendukung
92	PPS Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPT Pusat	Utama
93	PPI Sodohoa	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
94	PP Laino	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
95	PP Langara	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
96	PP Lasolo	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
97	PP Minaminanga	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
98	PP Molawe	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
99	PP Numana	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
100	PP Pasarwajo	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
101	PP Rumbia Tengah	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
102	PP Sampolawa	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
103	PP Soropia	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
104	PP Tondasi	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
105	PP Torobulu	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
106	PP Wameo	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 03	UPTD	Pendukung
107	PPS Bitung	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 03	UPT Pusat	Utama
108	PP Atep Oki	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
109	PP Belang	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
110	PP Dodepo	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
111	PP Kema	Provinsi Sulawesi Utara	Zona 03	UPTD	Pendukung
112	PPS Lampulo	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Utama
113	PPP Labuhanhaji	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
114	PPI Ujong Baroeh	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
115	PPI Ujung Serangga	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
116	PP Anak Laut	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
117	PP Keude Meukek	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
118	PP Kuala Tuha	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
119	PP Lhok Bengkuang	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
120	PP Rigah	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
121	PP Sawang Ba'u	Provinsi Aceh	Zona 04	UPTD	Pendukung
122	PP Teluk Sinabang (Lugu)	Provinsi Aceh	Zona 04	PP Perintis	Pendukung
123	PPN Pengambengan	Provinsi Bali	Zona 04	UPT Pusat	Utama
124	PPI Kedonganan	Provinsi Bali	Zona 04	UPTD	Pendukung
125	PU Benoa	Provinsi Bali	Zona 04	Umum	Pendukung
126	PPP Labuan	Provinsi Banten	Zona 04	UPTD	Pendukung
127	PP Binuangeun	Provinsi Banten	Zona 04	UPTD	Pendukung
128	PP Cikeusik	Provinsi Banten	Zona 04	UPTD	Pendukung
129	PP Panimbang	Provinsi Banten	Zona 04	UPTD	Pendukung
130	PP Sidamukti	Provinsi Banten	Zona 04	UPTD	Pendukung
131	PPP Pulau Baai	Provinsi Bengkulu	Zona 04	UPTD	Pendukung
132	PPP Sadeng	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Zona 04	UPTD	Pendukung
133	PP Gesing	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Zona 04	UPTD	Pendukung
134	PPN Palabuhanratu	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPT Pusat	Utama
135	PP Batukaras	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
136	PP Cikidang	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	PP Perintis	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
137	PPP Cilauteureun	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
138	PP Jayanti	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
139	PP Pamayangsari	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
140	PP Ranca Buaya	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
141	PP Ujung Genteng	Provinsi Jawa Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
142	PPS Cilacap	Provinsi Jawa Tengah	Zona 04	UPT Pusat	Utama
143	PP Logending	Provinsi Jawa Tengah	Zona 04	UPTD	Pendukung
144	PPN Prigi	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPT Pusat	Pendukung
145	PPP Muncar	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
146	PPP Pondok Dadap	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
147	PPP Puger	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
148	PPP Tamperan	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
149	PP Grajagan	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
150	PP Pancer	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
151	PP Popoh	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
152	PP Sine	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
153	PP Tambakrejo	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
154	PP Tawang	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
155	PP Tegalrejo	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
156	PP Watu Ulo	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
157	PU Tanjung Wangi/PP Masami	Provinsi Jawa Timur	Zona 04	Umum dan Swasta	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
158	PPP Kota Agung	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
159	PPP Lempasing	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
160	PPI Kalianda	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
161	PPI Ketapang	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
162	PPI Muara Piluk Bakauheni	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
163	PPI Rangai	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
164	PP Bengkuntat	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
165	PP Durian	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
166	PP Kramat	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
167	PP Kuala Stabas Krui	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
168	PP Kunjir	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
169	PP Way Muli	Provinsi Lampung	Zona 04	UPTD	Pendukung
170	PPP Labuhan Lombok	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
171	PPI Tanjung Luar	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
172	PP Sape	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
173	PP Soroadu	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
174	PP Teluk Awang	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 04	PP Perintis	Utama

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
175	PP Amagarapati	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
176	PP Oeba	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
177	PP Tenau	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Zona 04	UPTD	Pendukung
178	PPS Bungus	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPT Pusat	Utama
179	PPI Air Bangis	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
180	PPI Carocok Tarusan	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
181	PPI Kambang	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
182	PPI Sasak	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
183	PPI Sikakap	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
184	PPI Tiku	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
185	PP Pasir Baru	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
186	PP Surantiah	Provinsi Sumatera Barat	Zona 04	UPTD	Pendukung
187	PPN Sibolga	Provinsi Sumatera Utara	Zona 04	UPT Pusat	Utama

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
188	PPI Pulo Tello	Provinsi Sumatera Utara	Zona 04	UPTD	Pendukung
189	PPN Idi	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
190	PPI Peudada	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
191	PPI Pusong	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
192	PP Ie Meulee	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
193	PP Krueng Mane	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
194	PP Kuala Langsa	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
195	PP Kuala Peukan Baro	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
196	PP Kuala Tari	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
197	PP Lambada	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
198	PP Meureudu	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
199	PP Pante Raja	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
200	PP Seuneubok Baroh	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
201	PP Ujung Blang	Provinsi Aceh	Zona 05	UPTD	Pendukung
202	PPI Dumai	Provinsi Riau	Zona 05	UPTD	Pendukung
203	PPS Belawan	Provinsi Sumatera Utara	Zona 05	UPT Pusat	Utama
204	PPI Tanjung Balai Asahan	Provinsi Sumatera Utara	Zona 05	UPTD	Pendukung
205	PP Tanjung Tiram	Provinsi Sumatera Utara	Zona 05	UPTD	Pendukung
206	PPP Labu	Provinsi Sumatera Utara	Zona 05	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
207	PPI Sangsit	Provinsi Bali	Zona 06	UPTD	Pendukung
208	PPN Karangantu	Provinsi Banten	Zona 06	UPT Pusat	Pendukung
209	PP Cituis	Provinsi Banten	Zona 06	UPTD	Pendukung
210	PP Kronjo	Provinsi Banten	Zona 06	UPTD	Pendukung
211	PP Pulokali	Provinsi Banten	Zona 06	UPTD	Pendukung
212	PPS Nizam Zachman	Provinsi DKI Jakarta	Zona 06	UPT Pusat	Utama
213	PPN Muara Angke	Provinsi DKI Jakarta	Zona 06	UPTD	Pendukung
214	PPN Kejawanan	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPT Pusat	Utama
215	PPP Muara Ciasem	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
216	PPP Blanakan	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
217	PPP Bondet	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
218	PPP Ciparage	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
219	PPP Eretan	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
220	PP Dadap	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
221	PP Gebang Mekar	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
222	PP Karangsong	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
223	PP Pal Jaya	Provinsi Jawa Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
224	PPN Pekalongan	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPT Pusat	Pendukung
225	PPP Asemtoyong	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
226	PPP Bajomulyo	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Utama
227	PPP Karimunjawa	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
228	PPP Klidang Lor	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
229	PPP Morodemak	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
230	PPP Tasik Agung	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
231	PPP Tawang	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
232	PPP Tegalsari	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Utama
233	PPP Wonokerto	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
234	PPI Larangan	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
235	PP Karanganyar	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
236	PP Kluwut	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
237	PP Pulolampes	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
238	PP Sarang	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
239	PP Tanjung Sari	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
240	PP Ujung Batu	Provinsi Jawa Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
241	PPN Brondong	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPT Pusat	Utama
242	PPP Bulu	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
243	PPP Lekok	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
244	PPP Mayangan	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Utama
245	PPP Paiton	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
246	PPI Bawean	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
247	PPI Pasongsongan	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
248	PP Banyusangkah	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
249	PP Besuki	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
250	PP Branta Pesisir	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
251	PP Camplong	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
252	PP Campurejo	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
253	PP Karang Agung	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
254	PP Ngemplakrejo	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
255	PP Palang	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
256	PP Panarukan	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
257	PP Pondok Mimbo	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
258	PP Randu Putih	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
259	PP Weru	Provinsi Jawa Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
260	PPP Batulicin	Provinsi Kalimantan Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
261	PPI Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
262	PPI Kotabaru	Provinsi Kalimantan Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
263	PPI Muara Kintap	Provinsi Kalimantan Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
264	PPI Kuala Pembuang	Provinsi Kalimantan Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
265	PPI Kumai	Provinsi Kalimantan Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
266	PP Bahaur	Provinsi Kalimantan Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
267	PP Kuala Jelai	Provinsi Kalimantan Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
268	PPI Selili	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
269	PPI Tanjung Limau	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
270	PP Api-Api	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
271	PP Manggar Baru	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
272	PP Sangatta	Provinsi Kalimantan Timur	Zona 06	UPTD	Pendukung
273	PPP Labuhan Maringgai	Provinsi Lampung	Zona 06	UPTD	Pendukung
274	PPP Teladas	Provinsi Lampung	Zona 06	UPTD	Pendukung
275	PPI Kuala Penet	Provinsi Lampung	Zona 06	UPTD	Pendukung
276	PPI Teluk Santong	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
277	PP Soro Kempo	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
278	PPI Palipi	Provinsi Sulawesi Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
279	PP Kasiwa	Provinsi Sulawesi Barat	Zona 06	UPTD	Pendukung
280	PPI Birea	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
281	PPI Bonehalang	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
282	PP Beba	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung

No	Pelabuhan Pangkalan	Lokasi	Zona	Pengelola	Kategori PP PIT Utama dan PP PIT Pendukung
283	PP Bonto Bahari Bulukumba	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
284	PP Bonto Bahari Maros	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
285	PP Cempae	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
286	PP Kajang	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
287	PP Lappa	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
288	PP Lero	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
289	PP Lonrae	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
290	PP Polejiwa	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
291	PP Pontap	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	UPTD	Pendukung
292	PP Untia	Provinsi Sulawesi Selatan	Zona 06	PP Perintis	Utama
293	PPI Donggala	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
294	PP Mapaga	Provinsi Sulawesi Tengah	Zona 06	UPTD	Pendukung
295	PP Mangolo	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 06	UPTD	Pendukung
296	PP Pitulua	Provinsi Sulawesi Tenggara	Zona 06	UPTD	Pendukung

B. Pelabuhan Pangkalan yang Menerapkan PNBP Pascaproduksi (Pelabuhan)

Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi adalah pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi dua kriteria sebagai berikut:

1. Lokasi pelabuhan pangkalan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. PNBP Pasca Produksi pada pelabuhan pangkalan telah direalisasikan.

Indikator kinerja pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi ini pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 90 Pelabuhan. Pada triwulan I Tahun 2024 belum dapat dilakukan perhitungan, dikarenakan target di ukur dalam waktu tahunan.

C. Tingkat penerapan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan (Nilai/Skala)

Kriteria yang dipenuhi oleh pelabuhan pangkalan dalam pelaksanaan PNBP Pasca Produksi. Kriteria ditetapkan berdasarkan skala 1-3 dengan tingkatan sebagai berikut:

1. Kurang (<50%)
2. Sedang (50-<80%)
3. Baik (80-100%)

Kriteria:

1. Persentase ketersediaan SDM pendukung penerapan PNBP Pasca Produksi (ketersediaan SDM dibanding dengan kebutuhan SDM);
2. Persentase jumlah kapal perikanan izin pusat yang berkontribusi terhadap PNBP Pasca Produksi (jumlah kapal yang kontribusi/kapal izin pusat);
3. Persentase pendataan produksi ikan hasil tangkapan dari pendaratan kapal izin pusat (perbandingan pelabuhan perikanan yang menyampaikan data dengan kepatuhan input di PIPP).

Indikator tingkat penerapan PNBP pasca produksi di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan ini pada tahun 2024 ditargetkan senilai 89. Pada triwulan I Tahun 2024 belum dapat dilakukan perhitungan, dikarenakan target di ukur dalam waktu tahunan

D. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Fish Market Bertaraf internasional yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)

Indikator ini menunjukkan Persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan Pasar Ikan bertaraf Internasional.

Pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf Internasional ini meliputi kegiatan:

1. Proses penyiapan Loan Effective **(20%)**
 - Pembukaan rekening khusus (10%)
 - Proses permohonan pengisiran *Initial Deposit* Rekening khusus dan permohonan nol (10%)
2. Pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf Internasional **(80%)**
 - Pendampingan sekaligus fungsi administrasi untuk kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf internasional yang dikembangkan berupa penyusunan perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan (*review masterplan* dan DED) dan penyiapan pengawasannya (20%)
 - Tanda tangan kontrak jasa konsultansi (PMC dan CMC) untuk lokasi proyek IFP-IFM Phase I (20%)
 - Pengendalian perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan pasar ikan bertaraf internasional (20%)
 - Penyiapan dokumen tender pekerjaan konstruksi untuk 2 lokasi (PPN Kejawanan dan PPN Pengambangan) (20%)

Pengukuran indikator ini dilakukan dalam waktu tahunan dengan target indikator ini adalah 100 pada tahun 2024. Pada triwulan I ini belum dilakukan perhitungan capaian, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

- E. Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep Eco Fishing Port yang dibiayai Melalui Pinjaman Luar Negeri (Persen)

Indikator ini menunjukkan persentase pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang terbangun melalui pembiayaan PHLN dan telah dilakukan perjanjian pendanaan (*Loan Agreement*). Penyiapan pelabuhan perikanan ini dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep *Eco Fishing Port* (pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan) ini meliputi kegiatan:

1. Pendampingan sekaligus fungsi administrasi untuk kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan berupa penyusunan perencanaan pengembangan pelabuhan perikanan (*review masterplan* dan *Basic Design*). (25%)
2. Pengendalian perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan yang yang berwawasan lingkungan (25%)
3. Tanda tangan kontrak jasa konsultansi TAO/PMC dan CMC. (25%)
4. Penyiapan dokumen tender pekerjaan jasa konstruksi untuk lokasi proyek Eco Fishing Port. (25%)

Pengukuran indikator ini dilakukan dalam waktu tahunan dengan target indikator ini adalah 100 pada tahun 2024. Pada triwulan I ini belum dilakukan perhitungan capaian, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai IKU ini adalah sebagai berikut:

3.2.4 Sasaran Kegiatan (SK-4): Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan

Indikator ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran, usaha garam, penyuluhan, dan karantina ikan. Tenaga kerja terlibat dalam indikator ini terdiri dari syahbandar, petugas syahbandar, petugas CPIB, dan petugas PIPP.

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan atau tahunan dengan target indikator sebesar 422 pada tahun 2024. Pada triwulan I ini belum dilakukan perhitungan capaian.

3.2.5 Sasaran Kegiatan (SK-5): Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dilingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

A. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Indikator Kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Sedangkan dimensi kompetensi merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus. Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin. Pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP.

Tantangan dalam pencapaian IKU ini salah satunya yaitu terkait sisi pemutakhiran database kepegawaian. Dimana masih banyak data yang belum diperbaharui secara berkala oleh pengelola aplikasi kepegawaian Sistem Kepegawaian (SIMPEG) online KKP. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah dari dimensi kompetensi. Dimana masih banyak pejabat struktural yang belum melaksanakan diklatpim sesuai levelnya, diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dan seminar serta untuk staf pun masih banyak yang belum melaksanakan diklat 20 JP dan mengikuti seminar. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan updating secara berkala, koordinasi dan bimtek updating data SIMPEG, serta mengembangkan aplikasi SIMPEG secara lebih *user friendly*. Sedangkan dari dimensi kompetensi, upaya koordinasi telah dilakukan dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP untuk merencanakan pelatihan bagi pegawai KKP, diklat pelatihan dan pendidikan bagian pegawai.

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap setiap 6 (enam) bulan atau semesteran dengan target indikator ini adalah 84 pada tahun 2024. Pada triwulan I ini belum dilakukan perhitungan capaian, namun dapat dilihat pada gambar dibawah ini sampai dengan triwulan I berdasarkan aplikasi <https://ropeg.kkp.go.id/>



Silakan ketik Nama Unit Kerja.

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	94	21.35	85.4 %	10.59	26.47 %	25.32	84.4 %	5	100 %	62.26	RENDAH
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN	52	21.35	85.4 %	19.3	48.25 %	26.63	88.77 %	5	100 %	72.28	SEDANG
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	55	21.69	86.76 %	17.59	43.97 %	26.73	89.1 %	5	100 %	71.01	SEDANG
4	DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN	58	21.62	86.48 %	21.87	54.68 %	25.43	84.77 %	5	100 %	73.92	SEDANG
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	58	21.55	86.2 %	21.67	54.18 %	25.95	86.5 %	5	100 %	74.17	SEDANG

Gambar 4. IP ASN Tahun 2024 Direktorat Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2024

(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024)

Kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2024 dalam mendukung indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Identifikasi rencana kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di lingkup Direktorat Kelautan dan Perikanan;
2. Identifikasi dan Pengisian Matriks *Human Capital Development Plan* (HCDP).

Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 19 Maret 2024 dibuka oleh Ketua Tim kerja Dukungan Manajerial yang selanjutnya dipandu oleh Analis SDM Aparatur Ahli Muda dalam sesi diskusi; serta dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja SDM Aparatur dan Organisasi, Setditjen Perikanan Tangkap yang dalam kesempatan ini selaku narasumber, Aparatur Sipil Negara (PNS dan P3T) dilingkungan Ditjen Perikanan Tangkap yang jabatannya telah memiliki Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 79 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Khusus untuk ASN dilingkup Dit. Kelautan dan Perikanan, terdapat 57 orang ASN yang menjadi objek HCDP untuk tahun 2024 ini *sebagaimana terlampir*;

tujuan penyelenggaraan rapat yakni mengidentifikasi kompetensi ASN pemangku jabatan dan sekaligus melihat adanya kesenjangan (*gap*) dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 79 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus melihat upaya peningkatan kompetensi melalui Diklat yang dibutuhkan serta melakukan asistensi dalam pengisian matriks HCDP tersebut;

Berdasarkan hasil pembahasan selama rapat, disampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

- a. rencana pengembangan Sumberdaya Manusia (*Human Capital Development Plan/HCDP*) adalah suatu perencanaan yang komprehensif tentang pengembangan SDM yang mencakup *program degree* dan *non-degree* dengan mengacu pada kebutuhan organisasi yang tercermin dari grand strategi organisasi, serta tugas dan fungsi organisasi;

- b. dasar hukum pelaksanaan HCDP yakni: 1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, 3) Perka BKN No. 22 Tahun 2013 tentang pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan PNS, 4) PermenKP No 44 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi ASN dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 5) Peraturan LAN No. 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (CORPU);
- c. tujuan rencana pengembangan Sumberdaya Manusia (*Human Capital Development Plant/HCDP*) adalah: 1) mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang dipersyaratkan, 2) terciptanya keselarasan antara proses pengelolaan SDM dengan rencana strategis dan proses penganggaran;
- d. program diklat dan pengembangan dalam dokumen HCDP yakni: 1) program gelar (*degree program*), program Non gelar (*Non Degree Program*), 3) program pemanfaatan lulusan diklat/re entry program);
- e. dalam melengkapi matriks isian HCDP, Para ASN tidak menambah/mengurangi data-data yang sudah tertera sebelumnya, mengingat isian matriks tersebut sudah mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
- f. para pemangku jabatan yang telah memiliki jenjang pendidikan melebihi yang dipersyaratkan, agar memberikan tambahan informasi terkait dengan jenjang pendidikan tersebut dan jurusan pada kolom sub jenis kompetensi. Sementara itu bagi yang belum memenuhi jenjang Pendidikan sebagaimana yang dipersyaratkan, agar memberikan tambahan informasi jenjang pendidikan yang diminati dan jurusannya;
- g. untuk poin pelatihan, keterampilan, dan sertifikasi; para ASN dalam mengisi matriks juga *mengupload* sertifikat sebagai dokumen buktinya dalam *e-pegawai* masing-masing;
- h. terkait dengan rencana pengembangan kompetensi (pemenuhan jabatan saat ini), diharapkan memberikan pilihan rencana pelatihan satu buah untuk tiap jenis pelatihan yakni pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikal;
- i. Untuk pelatihan dimungkinkan menambahkan informasi terkait jenis pelatihan secara spesifik, untuk nantinya sebagai masukan dalam revisi standar kompetensi;

Sebagai tindaklanjut rapat ini, masing-masing pemangku jabatan diharapkan dapat melengkapi matriks HCDP yang telah disediakan sebelumnya secara objektif dan apa adanya, guna memotret kondisi yang sebenar-benarnya dan selanjutnya disampaikan ke Tim Kerja Dukungan Manajerial untuk dilakukan pengolahan data sebelum disampaikan ke Setditjen Perikanan cq. Tim Kerja SDM Aparatur dan organisasi selambat-lambatnya 22 Maret 2024

B. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari rekonsiliasi kinerja adalah untuk meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP dan memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja.

- a. Output yang dinilai dalam rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yaitu
 - Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian dan ketepatan masing-masing unit kerja;
 - Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon, dan;
 - Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti.
- b. Dokumen yang dinilai dalam rekonsiliasi kinerja:
 - Perjanjian Kinerja (PK)
 - Manual IKU
 - Rincian Target IKU
 - Rencana Aksi (Renaksi)
 - Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I, II, dan III
 - Dokumen data Dukung Lkj Triwulan III
- c. Nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya, terhadap 5 (lima) komponen SAKIP (kinerja) di Dit. Kepelabuhanan Perikanan, yaitu:
 - Perencanaan Kinerja;
 - Pengukuran Kinerja;
 - Pelaporan Kinerja;
 - Evaluasi Kinerja, dan;
 - Pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Pada tingkat eselon II KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh secara internal lingkup eselon I. Target indikator nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan pada 2024 adalah 94%. Realisasi indikator kinerja ini pada triwulan I Tahun 2024 belum dapat diperoleh dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan.

C. Persentase Unit Kerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Target Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar pada Direktorat Kelabuhanan Perikanan adalah sebesar 94%. Berdasarkan pengukuran, didapatkan capaian Triwulan I Tahun 2024 Direktorat Kelabuhanan Perikanan sebesar 133,33%, dengan persentase capaian terhadap target sebesar 141,84%. Hal ini sesuai dengan Memorandum dari Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, nomor 929/DJPT.1/TU.140/IV/2024, tanggal 19 April 2024, perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP Triwulan I Tahun 2024 lingkup DJPT.

Tabel 9. Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sampai dengan triwulan I tahun 2024

Nama IKU	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
Persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	94	133,33	141,84

(Sumber: Direktorat Kelabuhanan Perikanan, 2024)

Tabel 10. Perbandingan Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sampai dengan triwulan I tahun 2024

SS 5	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan lingkungan Direktorat Kelabuhanan Perikanan										
IKU 20	Persentase Unit Kerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)										
Realisasi TW III 2019-2023					Realisasi 2024					Renstra DJPT	
TW I 2019	TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	Target Tahun 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd Target TW I 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra
			0	-	94	94	133,33	141,84	141,84	94	141,84

(Sumber: Direktorat Kelabuhanan Perikanan, 2024)

D. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan

Indikator ini menunjukkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan kepada Direktorat Kelabuhanan Perikanan berdasarkan LHP yang terbit pada Triwulan I Tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang dokumennya telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) oleh Direktorat Kelabuhanan Perikanan.

Target Capaian IKU rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Kelabuhanan Perikanan adalah sebesar 80%. Berdasarkan pengukuran, didapatkan capaian Triwulan I Tahun 2024 Direktorat Kelabuhanan Perikanan sebesar 83,63%, dengan persentase capaian terhadap target sebesar 104,54%.

Tabel 11. Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan” sampai dengan triwulan I tahun 2024

Nama IKU	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kelabuhanan Perikanan	80	83,63	104,54

(Sumber: Direktorat Kelabuhanan Perikanan, 2024)

Tabel 12. Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan” sampai dengan triwulan I tahun 2024

SS 5 Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan lingkungan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan												
IKU 21 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)												
Realisasi TW I 2019-2023					Realisasi 2024					Renstra DJPT		
TW I 2019	TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	Target Tahun 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% Realisasi thd Target TW I 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target Renstra 2024	% Capaian TW I thd Target Akhir Renstra	
-	-	100	100	100	80	80	83,63	104,54	104,54			

(Sumber: Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, 2024)

E. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Persentase penyerapan anggaran adalah suatu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan.

Target indikator nilai persentase penyerapan anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan adalah 40% untuk semester I dan 98% untuk semester II. Realisasi indikator kinerja ini pada triwulan I Tahun 2024 belum dapat diperoleh dikarenakan perhitungannya dilakukan semesteran.

Alokasi anggaran Direktorat Kepelabuhanan Perikanan tahun 2024 sebesar Rp.86.705.270.000. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Maret tahun 2024 adalah sebesar Rp. 10.483.805.304,- atau telah mencapai 12,09%. Adapun realisasi berdasarkan aplikasi <https://sakti.kemenkeu.go.id/> pengelompokan anggaran yaitu sebagai berikut:

Tabel 13. Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2024

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	
	(Rp)	(Rp)	%
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (2338)	86.705.270.000	10.483.805.304	12,09
PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	1.287.000.000	18.000.000	1,40
BGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	3.859.520.000	662.957.689	17,18
QGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	32.921.739.000	7.041.071.949	21,39
RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	39.728.091.000	1.693.920.784	4,26

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	
	(Rp)	(Rp)	%
SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	6.000.000.000	5.066.000	0,08
FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	187.920.000	-	0,00

BAB 4. PENUTUP

Direktorat Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu unit eselon II di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kelautan dan Perikanan berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Rencana strategis KKP, Rencana strategis DJPT, dan perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kelautan dan Perikanan triwulan I Tahun 2024 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama triwulan I. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya pada triwulan I sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Terdapat cara perhitungan baru pada tahun 2024, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

IKU yang belum memenuhi target pada triwulan I, lebih disebabkan oleh kendala non teknis, karena IKU tersebut pengukurannya bersifat semesteran atau tahunan pada akhir tahun. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kelautan dan Perikanan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan selanjutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU agar dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya. Tindaklanjutnya melaksanakan rapat koordinasi terkait percepatan penyelesaian kegiatan pendukung IKU lingkup Direktorat Kelautan dan Perikanan.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada triwulan IV sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun. Tindaklanjutnya membuat jadwal perencanaan kegiatan untuk triwulan, semester.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun, agar dapat direalisasikan pada awal triwulan I. Tindaklanjutnya konsisten terhadap jadwal pelaksanaan yang telah dibuat.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Direktorat Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Direktur Kelautan dan Perikanan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.